

---

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

# **KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022



**Dinas Lingkungan Hidup**

Jln. Raden Demang Hardjakusumah, Komplek Perkantoran  
Pemkot Cimahi, Kota Cimahi

# Ringkasan Eksekutif

## Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Cimahi, Maret 2020

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022

Disusun oleh:



Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Alamat : Jl. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi,  
Kota Cimahi, Jawa Barat

Telepon : (022) 6632614

Fax. : (022) 6632614

Email : dlh@cimahikota.go.id

### **Peringatan**

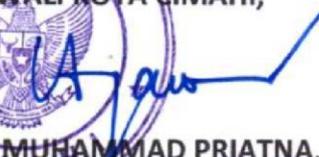
*Dokumen KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun dari bulan November 2019 – Maret 2020. Meskipun upaya optimal telah dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan data terkini yang tersedia saat ini, perlu dipahami bahwa data dan informasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada waktu mendatang (masa depan). Dokumen KLHS ini milik POKJA KLHS Kota Cimahi, untuk reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi selaku ketua POKJA KLHS.*



## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat menyelesaikan buku Ringkasan Eksekutif Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. Penyusunan Ringkasan Eksekutif Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini mengacu pada Dokumen Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, dengan tujuan utama untuk memastikan agar Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) tersebut dilaksanakan. Hasil dari penyusunan KLHS ini diharapkan dapat meminimalkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Cimahi.

 Juni 2020  
WALI KOTA CIMAH,  
  
Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
1.    Pendahuluan .....	1
2.    Kondisi Umum Kota Cimahi .....	2
2.1    Kondisi Lingkungan Hidup.....	2
2.2    Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	5
3.    Rumusan Isu Prioritas .....	6
4.    Skenario Pencapaian TPB Prioritas .....	7
4.1    Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (TPB 11) .....	7
4.2    Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6) .....	8
4.3    Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3) .....	8
4.4    Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10) .....	9
4.5    Penanggulangan Perubahan Iklim (TPB 13) .....	10
4.6    Tanpa Kemiskinan (TPB 1).....	10
4.7    Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17) .....	11
5.    Penutup.....	11
LAMPIRAN TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF .....	13
Prioritas ke-1: TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	13
Prioritas ke-2: TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak .....	15
Prioritas ke-3: TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	17
Prioritas ke-4: TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan .....	18
Prioritas ke-5: TPB 13 Penanggulangan Perubahan Iklim .....	19
Prioritas ke-6: TPB 1 Tanpa Kemiskinan .....	20
Prioritas ke-7: TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan .....	21



## **1. Pendahuluan**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 perlu disusun untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan KLHS RPJMD, KLHS ini disusun dan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS**

Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup, beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD, serta melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan**

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan, dan pembagian peran antara sektor pemerintah dan sektor lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.

### **3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan**

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi



kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.

#### 4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Hasil penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD yang dilakukan pada isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan ditanda tangani oleh kepala daerah. KLHS yang telah dibuat dan dilaksanakan wajib dilakukan validasi oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Kondisi Umum Kota Cimahi

Kondisi umum dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi meliputi kondisi lingkungan hidup dan kondisi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### 2.1 Kondisi Lingkungan Hidup

Ringkasan hasil analisis kondisi lingkungan hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

#### 1. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

- Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir.
- Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, dan regenerasi tanah.
- Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, pengaturan air dan banjir, siklus hara, penyedia pangan, dan pengendalian hama.

#### 2. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- Sebagian besar wilayah di Kota Cimahi memiliki status DDLH penyedia pangan yang telah melampaui ambang batas, yaitu sekitar 89,29% dari luas



wilayah (*in situ*). Sementara itu, sekitar 10,71% memiliki status DDLH penyedia pangan yang belum melampaui ambang batas dan tersebar di sebagian kecil wilayah di setiap kelurahan, seperti bagian utara Kelurahan Cipageran dan bagian timur Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, bagian barat Kelurahan Padasuka dan sebagian wilayah Kelurahan Baros di Kecamatan Cimahi Tengah, sebagian wilayah di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan. Secara akumulatif, selisih ketersediaan bahan pangan Kota Cimahi telah defisit.

- DDLH penyedia air bersih wilayah Kota Cimahi sebagian besar juga sudah melampaui ambang batas, yaitu sekitar 79,66% dari luas wilayah (*in situ*). Sekitar 20,34% memiliki status DDLH penyedia air yang belum melampaui ambang batas dan tersebar di sebagian besar wilayah di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Secara akumulatif, selisih ketersediaan air bersih Kota Cimahi telah defisit.

### **3. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup**

- Pola tekanan penduduk menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Tekanan penduduk yang tinggi berada di wilayah pusat kota (sekitar Kelurahan Cimahi di Kec. Cimahi Tengah) dan di wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung (Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kec. Cimahi Selatan).
- Peningkatan timbulan sampah dan lumpur tinja terjadi dari tahun 2016 hingga 2050 terjadi di Kota Cimahi, dengan pola mengikuti pola pertumbuhan penduduk.
- Potensi beban pencemar Kota Cimahi semakin meningkat dari tahun 2016-2050 dengan peningkatan paling tinggi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan. TSS adalah zat pencemar yang memiliki presentasi peningkatan tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi, khususnya di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentase sebesar 14,84%.
- Wilayah Cekungan Bandung, termasuk Cimahi, cukup rentan terhadap penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah di wilayah Cekungan Bandung diduga diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan. Total penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Bandung termasuk Leuwigajah Kota Cimahi ada yang mencapai 3-4 meter.



- Luas lahan kritis di Kota Cimahi dengan status sangat kritis sebesar 567,62 Ha atau 13,36% dari luas wilayah, dan status kritis sebesar 121,86 Ha atau 2,87% dari luas wilayah Kota Cimahi.

#### **4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

- Efisiensi penyediaan pangan di Kota Cimahi bernilai antara 49% hingga 55% yang tersebar merata hampir di semua wilayah. Nilai efisiensi tinggi yang lebih dari 60% tersebar pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah. Kawasan dengan tutupan lahan berupa sawah yang seharusnya memiliki efisiensi penyediaan pangan tinggi, masih belum optimal.
- Efisiensi penyediaan air di Kota Cimahi memiliki pola sebaran yang serupa dengan efisiensi penyediaan pangan, dengan nilai antara 49% hingga 55%. Kawasan dengan tutupan lahan berupa sawah yang seharusnya memiliki efisiensi penyediaan pangan tinggi. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan dengan tutupan lahan badan air yang mendominasi dengan efisiensi sebesar 72%.
- Efisiensi pengaturan tata air dan banjir di Kota Cimahi juga bernilai antara 49% hingga 55% dan tersebar merata hampir di semua wilayah, kecuali pada bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, dan sebagian kecil Kelurahan Setiamanah pada Kecamatan Cimahi Tengah yang memiliki nilai efisiensi lebih dari 60%. Pada efisiensi pengaturan tata air dan banjir, rencana pola ruang yang harus diperhatikan dan dioptimalkan efisiensinya terutama adalah kawasan resapan air (66,03%), kawasan sempadan sungai (58,77%), kawasan sempadan embung (60,93%), dan kawasan RTH perkotaan (49,03%).

#### **5. Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati**

- Secara umum, wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi di Kota Cimahi memiliki ketahanan yang sangat rendah. Hal ini direpresentasikan dengan nilai shape index yang rendah, sehingga potensi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut rentan mendapatkan ancaman.

#### **6. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim**

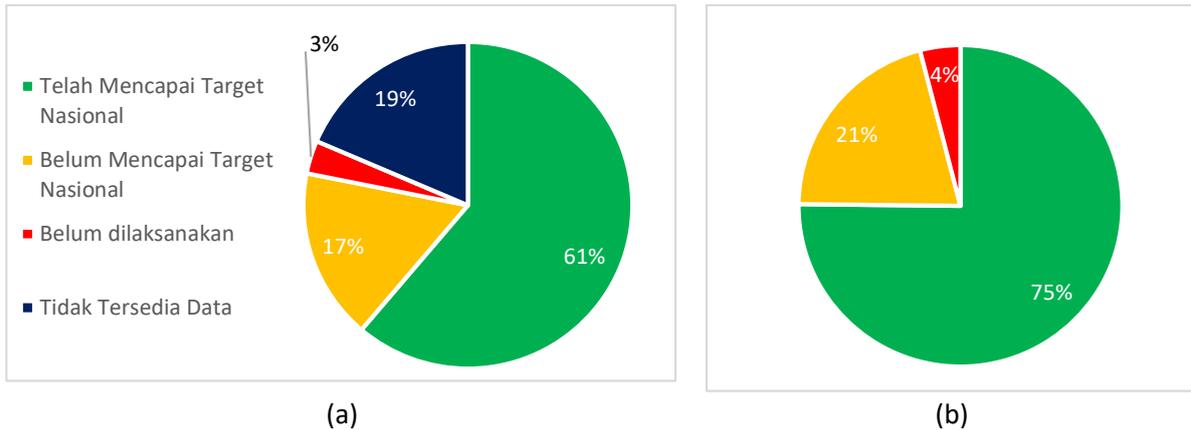
- Beberapa kejadian bencana terkait perubahan iklim yang sering terjadi di Kota Cimahi diantaranya adalah banjir, cuaca ekstrim, kekeringan dan tanah longsor.



- Indeks bahaya banjir tinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah dan sebagian kecil di Kecamatan Cimahi Utara. Sementara itu, indeks bahaya cuaca ekstrim yang tinggi hingga sedang tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Cimahi. Untuk tanah longsor, Kota Cimahi memiliki potensi bahaya tanah longsor pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi utara dan Kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk kekeringan, Kota Cimahi memiliki potensi bahaya kekeringan yang rendah.
- Kapasitas adaptasi terhadap bencana di Kota Cimahi bernilai relatif tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Cimahi dapat melakukan penyesuaian dengan cepat apabila terjadi bencana.

## **2.2 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Dari 183 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Cimahi, terdapat 81,42% indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan sisanya belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “belum dilaksanakan”, dan “tidak ada data”. Terdapat 61,20% dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional pada tahun 2018, atau 75,17% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Kondisi ini lebih baik dari capaian tahun 2016, dimana hanya 32,24% dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional, atau 39,60% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Sedangkan indikator TPB yang belum mencapai target nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 16,94% dari 183 indikator TPB atau 20,80% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Kondisi ini juga lebih baik dari capaian tahun 2016, dimana terdapat 42,62% indikator dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang belum mencapai target nasional, atau 52,35% dari indikator yang tersedia datanya. Persentase setiap kategori capaian indikator TPB terhadap 183 indikator yang menjadi kewenangan Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1-a**, serta persentase terhadap indikator TPB yang tersedia data capaiannya dapat dilihat pada **Gambar 1-b**.



**Gambar 1** Persentase Capaian Indikator TPB di Kota Cimahi terhadap Target Nasional:  
(a) Persentase terhadap 183 Indikator TPB yang Menjadi Kewenangan Kota Cimahi, dan  
(b) Persentase terhadap Indikator yang Terisi Capaiannya  
(Sumber: hasil analisis, 2020)

TPB 2 (Tanpa Kelaparan) memiliki persentase indikator TPB paling banyak yang telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 10 dari 11 indikator (90,91%); sebaliknya TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) memiliki persentase indikator TPB paling sedikit yang telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 1 dari 11 indikator (9,09%). Ditinjau dari indikator yang belum mencapai target nasional, TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki jumlah indikator TPB paling banyak, yaitu masing-masing sebanyak 5 indikator. Berdasarkan kondisi ini, dapat diindikasikan bahwa bahwa TPB 11 dan TPB 6 berpotensi menjadi isu di Kota Cimahi.

### 3. Rumusan Isu Prioritas

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (*baseline*) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Cimahi. Adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan *gap* capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, dan isu dari masukan uji publik. Hasil analisis penentuan dan pemeringkatan isu prioritas di Kota Cimahi yang disepakati dalam uji publik pada tanggal 16 Maret 2020, yaitu:



1. TPB 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
2. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
3. TPB 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. TPB 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
5. TPB 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
6. TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
7. TPB 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## **4. Skenario Pencapaian TPB Prioritas**

### **4.1 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (TPB 11)**

Pada umumnya sampah merupakan masalah utama yang dihadapi di wilayah perkotaan. Namun berdasarkan laporan dari hasil capaian, persentase penanganan sampah Kota Cimahi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Hasil laporan capaian permasalahan persampahan dapat ditangani pada tahun 2018 sebanyak 95% sementara target tahun 2019 adalah 80%. Jika diproyeksikan dengan menggunakan skenario *Business as Usual* (BAU), penanganan masalah sampah di Kota Cimahi telah sepenuhnya dapat tercapai di tahun 2019.

Meskipun capaian penanganan sampah Kota Cimahi sudah cukup baik, namun proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau masih belum optimal. Capaian tahun 2018 dan target tahun 2019 masih memiliki gap yang cukup signifikan yakni sekitar 73,56%. Jika menggunakan skenario BAU hingga tahun 2030, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau masih belum dapat mencapai target dengan gap sekitar 13,88%. Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya lebih untuk membuat seluruh Selain masalah tersebut, indikator lain yang bermasalah di TPB 11 adalah belum tersedianya sistem dan infrastruktur yang baik bidang transportasi umum dan kebencanaan. Kedua hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendorong TPB 11 menjadi isu prioritas pertama.

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kota dan permukiman berkelanjutan (TPB 11) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) berkurangnya



dampak lingkungan per kapita dan penanganan sampah terpadu; (2) terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau; serta (3) sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

## **4.2 Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)**

Kota Cimahi memiliki permasalahan yang cukup serius dalam air bersih. Daya dukung air di Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas dengan presentase sekitar 79,66%. Selain itu, Kota Cimahi juga dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga di Kota Cimahi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan sekitar 87,51%, sementara target nasional pada tahun 2019 yakni 100%. Sehingga masih terdapat gap sekitar 14,74%. Dengan menggunakan skenario BAU, Kota Cimahi mampu mencapai target 100% pada tahun 2020. Maka, diperlukan adanya upaya lebih untuk dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Pada TPB 6, selain air bersih, sanitasi juga termasuk indikator yang masih memiliki gap besar. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak berkelanjutan adalah sekitar 72,70%. Dengan target nasional 100% pada tahun 2019, maka masih terdapat gap sebesar 27,30%. Meskipun dilakukan proyeksi dengan skenario BAU, nilai capaian masih belum mampu mencapai target nasional hingga tahun 2030. Sehingga sangat diperlukan adanya upaya lebih agar dapat mencapai akses universal dan merata terhadap sanitasi yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target air bersih dan sanitasi layak (TPB 6) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air; (2) pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai; serta (3) pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

## **4.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)**

Masalah kesehatan menjadi salah satu isu utama dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. Beberapa indikator dalam TBP 3 yang bermasalah diantaranya terkait imunisasi dasar lengkap pada bayi dan cakupan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Imunisasi adalah salah satu upaya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit



yang penting untuk dilakukan sejak dini. Di Kota Cimahi, presentasi imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2018 adalah sebesar 93,59%. Nilai ini masih memiliki gap sekitar 1,41% terhadap target tahun 2019. Namun dengan diproyeksikan menggunakan skenario BAU, capaian presentasi imunisasi dasar lengkap pada bayi sudah dapat memenuhi target pada tahun 2019.

Terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera juga akan bergantung kepada pelayanan kesehatan untuk masyarakat, seperti adanya JKN. Pada tahun 2018, cakupan JKN di Kota Cimahi adalah sebesar 88,26%. Nilai ini belum mencapai target nasional 2019 yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Dengan proyeksi menggunakan skenario BAU, capaian cakupan JKN juga sudah dapat memenuhi target pada tahun 2019.

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) menurunkan angka kematian bayi dan balita; (2) mengurangi dan mencegah epidemi dan penyakit menular; serta (3) akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

#### **4.4 Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10)**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan adalah koefisien gini. Semakin rendah nilai dari koefisien gini menunjukkan semakin rendah pula kesenjangan di suatu wilayah. Nilai koefisien gini Kota Cimahi pada tahun 2018 masih belum dapat mencapai target tahun 2019 dengan gap sekitar 0,1%. Namun dengan menggunakan skenario BAU, pada tahun 2019 sudah dapat memenuhi target.

Selain capaian nilai koefisien gini yang cukup bagus ditahun 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Cimahi pada tahun 2018 juga sudah dapat mencapai target tahun 2019. Meskipun kedua indikator memiliki capaian yang cukup baik pada tahun 2019, terdapat beberapa capaian indikator lain pada TPB 10 yang belum memenuhi target dan juga hasil analisis TPB dengan isu RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 menunjukkan nilai ranking yang cukup tinggi, seperti belum optimalnya kualitas pendidikan, masih tingginya angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka, dan beberapa isu lainnya yang berpengaruh terhadap kesenjangan.

Terdapat dua *outcomes* yang berkaitan dengan target berkurangnya kesenjangan (TPB 10) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) mengurangi kesenjangan



ekonomi; dan (2) mengurangi kesenjangan hukum dan praktik diskriminatif lainnya. Kedua *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

#### **4.5 Penanggulangan Perubahan Iklim (TPB 13)**

Terdapat beberapa permasalahan terkait perubahan iklim yang dihadapi di Kota Cimahi. Diantaranya adalah belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional maupun daerah dan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), dan masih tingginya korban terdampak bencana. Hasil capaian di Kota Cimahi menunjukkan bahwa di tahun 2016 dan 2017 terdapat 42 per 100.000 orang korban terdampak bencana. Nilai ini mengalami kenaikan menjadi 1.313 korban di tahun 2018. Sementara itu, pada dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Cimahi 2017-2022 disampaikan bahwa target Kota Cimahi adalah 100% korban dapat dievakuasi. Pada dokumen tersebut disampaikan pula bahwa jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana perlu diminimalisir seiring dengan target di tahun 2030 yaitu secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Terdapat satu *outcome* yang berkaitan dengan target penanggulangan perubahan iklim (TPB 13) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam. *Outcome* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

#### **4.6 Tanpa Kemiskinan (TPB 1)**

Dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disebutkan bahwa Kota Cimahi menghadapi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2018, capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional cukup mencapai 4,94%. Namun nilai tersebut sudah dapat mencapai target nasional tahun 2019 karena berada dibawah angka target. Berdasarkan skenario BAU, nilai proyeksi capaian terus semakin menurun dan diprediksi persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan 0% pada tahun 2029.

Selain persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi juga menjadi perhatian pada TPB 1. Tingginya potensi bencana merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki Kota Cimahi. Pada tahun 2018, capaian indeks risiko berencana adalah 120 (sedang) sedangkan target nasional pada tahun 2019 adalah 118,6. Sehingga masih terdapat gap sekitar 1,40 atau dapat dikatakan belum mencapai target nasional.



Dengan proyeksi BAU hingga tahun 2030, justru dihasilkan gap yang cukup besar. Hal ini karena adanya keterbatasan data capaian sehingga dihasilkan proyeksi dengan nilai yang tetap hingga tahun 2030 sementara proyeksi target terus menurun. Sehingga sangat diperlukan upaya lebih untuk menurunkan target dan capaian indeks risiko bencana di Kota Cimahi terutama di wilayah yang banyak masyarakat miskin.

Terdapat dua *outcomes* yang berkaitan dengan target tanpa kemiskinan (TPB 1) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan; serta (2) membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana. Kedua *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

#### **4.7 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17)**

Salah satu hal utama yang dibutuhkan dalam penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global adalah pajak. Pajak memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Permasalahan pajak di Kota Cimahi cukup menjadi perhatian yang sangat serius. Pada tahun 2018, jumlah rasio penerimaan pajak terhadap PDB relatif sangat kecil yakni hanya mencapai 0,46%, sementara target nasional pada tahun 2019 sebesar 12%. Sehingga masih terdapat gap yang relatif besar yaitu 11,58%. Dengan skenario BAU, pada tahun 2030, jumlah capaian rasio penerimaan pajak justru semakin menurun hingga -0,30% sementara proyeksi target semakin naik hingga 15,6%. Sehingga terdapat gap cukup besar mencapai 15,87%. Sehingga sangat diperlukan upaya tambahan agar jumlah rasio penerimaan pajak dapat mencapai target.

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) memperkuat sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal; (2) mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat; serta (3) meningkatkan kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya.

### **5. Penutup**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen yang ditujukan untuk pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 merupakan rangkaian pedoman bagi seluruh



## **Ringkasan Eksekutif Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

---

pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang penyelenggaraannya memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini memerlukan keterlibatan aktif dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.



## LAMPIRAN

### TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF

#### Prioritas ke-1: TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

TUJUAN: 11		Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan						
1	ISU STRATEGIS	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.					
		11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
		11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
		11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					
		11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A



## Ringkasan Eksekutif Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<b>TUJUAN: 11</b>		<b>Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</b>					
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	0	0			0
11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0	0			0
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1,313	678	678		635.5	8939
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0	0			0
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp2,192,920,000	Rp2,810,510,000	Rp2,810,510,000		-Rp617,590,000	0
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	0	0	0			0
<b>3</b>	<b>PERMASALAHAN</b>						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</li><li>- Belum optimalnya pengembangan sistem angkutan rel</li><li>- Perlu adanya pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur</li><li>- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih perlu diminimalisir</li><li>- Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</li><li>- Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana yang perlu diturunkan</li><li>- Belum dibentuk dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah</li></ul>							
<b>4</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>						
<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkurangnya dampak lingkungan per kapita dan penanganan sampah terpadu</li><li>- Terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau</li><li>- Sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan</li></ul>							
<b>5</b>	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>						



## Prioritas ke-2: TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TUJUAN: 6		Air Bersih dan Sanitasi Layak						
1	ISU STRATEGIS	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
		6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
		6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
		6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	80.78%	72.79%	69.17%		15.30%	100%
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	312 l/dt	271 l/dt	250 l/dt		19.87%	100%
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	80.78%	80.78%	80.78%		-	-
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	72.70%	70.57%	70%		5.09%	95%
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	5.21%	4.66%	4.54%		18.81%	11%
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	101	45	17		84.16%	100%
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	belum ada insentif	-	-		-	-



## Ringkasan Eksekutif Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

---

<b>TUJUAN: 6</b>	<b>Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>
<b>3</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.</li><li>- Belum optimalnya akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.</li><li>- Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</li><li>- Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</li><li>- Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</li><li>- Belum adanya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</li></ul>
<b>4</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau.</li><li>- Pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai.</li><li>- Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air.</li></ul>
<b>5</b>	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>



### Proritas ke-3: TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TUJUAN: 3		Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
1	ISU STRATEGIS	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
		3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
		3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	93.59%	90.15%	90.15%		3.44%	100%
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	394	326	326		19.74	1210
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	11.71%	20.49%	20.49%		-8.79%	0
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	88.26%	79.49%	79.49%		8.77	100%
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan tingkat imunisasi dasar lengkap pada bayi.</li> <li>- Tingginya tingkat insiden Tuberkulosis (ITB).</li> <li>- Tingkat unmet need pelayanan kesehatan perlu diturunkan dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditingkatkan.</li> </ul>							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua.</li> <li>- Mengurangi dan mencegah epidemi dan penyakit menular.</li> <li>- Menurunkan angka kematian bayi dan balita.</li> </ul>							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							



#### Prioritas ke-4: TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan

<b>TUJUAN: 10</b>		<b>Berkurangnya Kesenjangan</b>						
<b>1</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>10.1</b>	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
<b>2</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>Baseline</b>	<b>Rata-rata</b>			<b>r (%)</b>	<b>Th. 2030</b>
	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.37	<b>mean</b>	<b>median</b>	<b>modus</b>	-0.14	0.08
<b>3</b>	<b>PERMASALAHAN</b>							
	- Angka koefisien gini yang masih perlu penurunan							
<b>4</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	- Mengurangi kesenjangan ekonomi. - Mengurangi kesenjangan hukum dan praktik diskriminatif lainnya.							
<b>5</b>	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							



### Prioritas ke-5: TPB 13 Penanggulangan Perubahan Iklim

TUJUAN: 13		Penanggulangan Perubahan Iklim						
1	ISU STRATEGIS	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1313	465	42	42	0.9	8727
3	PERMASALAHAN							
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih perlu diminimalisir								
4	SASARAN STRATEGIS							
- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.								
5	KOMPOSISI PENDANAAN							



### Prioritas ke-6: TPB 1 Tanpa Kemiskinan

TUJUAN: 1		Tanpa Kemiskinan						
1	ISU STRATEGIS	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
		1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	87.51%	77.22%	81.99%		0.3783	100%
	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	72.60%	71.74%	72.14%		0.03	74.73%
	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	80%	-	-		-	-
	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	120	120	120		-	-
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat miskin.</li> <li>- Belum optimalnya keterjangkauan sumber penerangan utama listrik baik dari PLN dan bukan PLN ke semua masyarakat miskin dan rentan.</li> <li>- Perlunya penurunan indeks risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan.</li> </ul>							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin &amp; rentan.</li> <li>-Membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana</li> </ul>							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							



## Prioritas ke-7: TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

TUJUAN: 17		Kemitraan untuk Mencapai Tujuan						
1	ISU STRATEGIS	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
		17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
		17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.					
2	INDIKATOR		Baseline	Rata-rata			r (%)	Th. 2030
				mean	median	modus		
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	9.10%	16.05%	16.05%		-6.95%	0%
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0			0
3	<b>PERMASALAHAN</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditingkatkannya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</li> <li>- Akses bergerak pita lebar (mobile broadband) perlu diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh populasi di perkotaan dan sebagian pedesaan.</li> <li>- Perlu disediakan alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.</li> <li>- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN.</li> </ul>							
4	<b>SASARAN STRATEGIS</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi</li> <li>- Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah,</li> </ul>							
5	<b>KOMPOSISI PENDANAAN</b>							